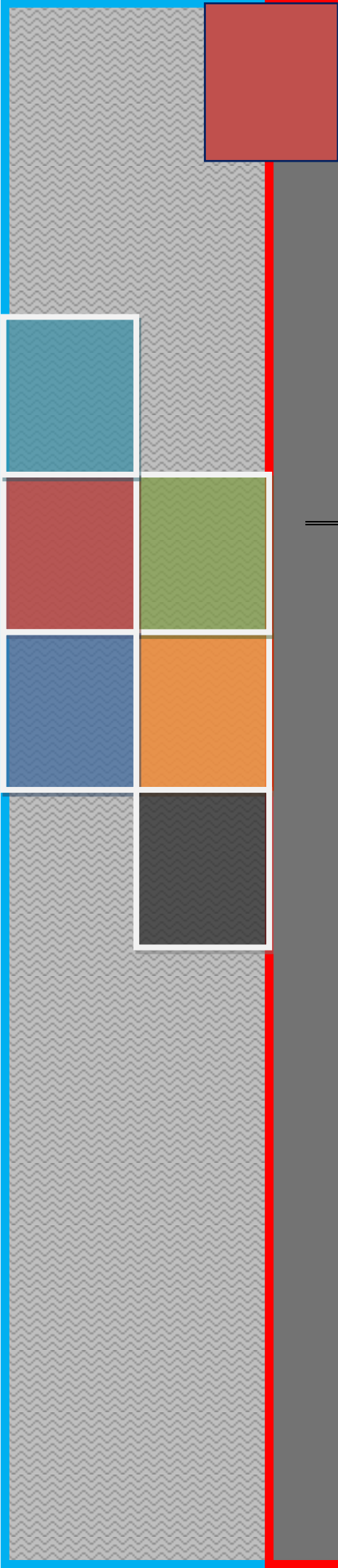




RENJA PERUBAHAN

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
Jalan Jenderal Sudirman
Kelurahan Weri
Telp. (0383) 21039
L A R A N T U K A



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, bimbingan dan penyertaan-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari Renstra yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Flores Timur.

Perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat mesti dilakukan secara sistematis dan terencana maka pemerintah daerah lewat organisasi perangkat daerah dituntut untuk menyusun Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dimaksud disusun dengan tetap mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan tentang perencanaan pembangunan dan sebagai bahan informasi target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2024. Hasilnya diharapkan agar dokumen renstra ini dapat menjadi dokumen yang mendasari penyusunan rencana kerja anggaran (RKA).

Demikian Renja ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan Lewotana Flores Timur yang tercinta.

Larantuka, 01 Agustus 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,

LAURENSIUS YITNO WADA,SE.M.Si
Pembina. Tk.I
NIP. 19730603 200003 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		1
Daftar Isi		2
BAB I : Pendahuluan		3
1. Latar Belakang		4
2. Landasan Hukum		4
3. Maksud dan Tujuan		6
4. Sistematika Penulisan		6
BAB. II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		8
1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu.....		8
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		20
3. Isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah		22
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....		23
5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....		45
BAB. III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....		48
1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional		48
2. Tujuan dan sasaran Renja PD		49
3. Program dan Kegiatan		50
BAB. IV : Rencana Kerja dan Pendanaan PD.....		63
BAB. V : Penutup.....		84

BAB I

BAB. I
PENDAHULUAN

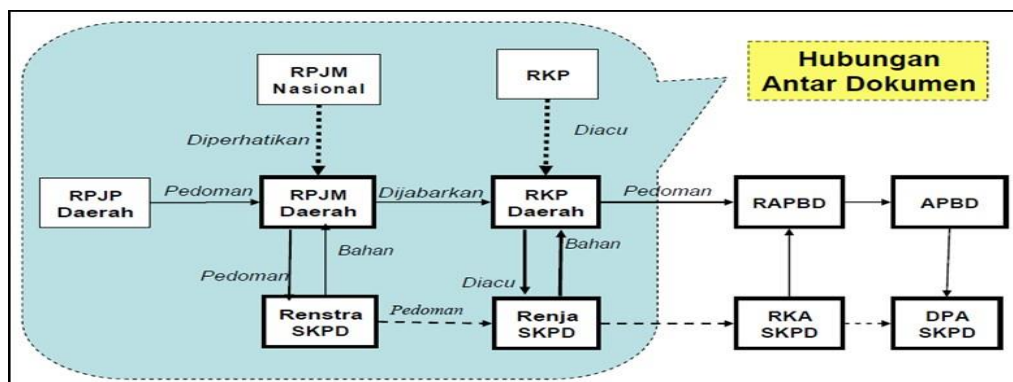
1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun pertama Renstra PD Perhubungan Tahun 2023-2026, untuk periode 2 (dua) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja PD Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Proses penyusunan Renja dan hubungan dengan dokumen lainnya.



Gambar 1.1 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.;
24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah:

- a. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur maupun antar wilayah;
- c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu baik antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur maupun antar wilayah;
- e. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan setiap PD.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2022 sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD

dan Pencapaian Renstra PD s/d tahun 2023

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Sampai Akhir Periode 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%) 2022		Realisasi capaian Program & Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A	Renstra 2017 - 2022									
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	50	100	154	154%			
		Tersedianya sarana Prasarana Aparatur (%)	100	74	100	99	99%			
		Jumlah Aparatur yang ditingkatkan disiplinnya (orang)								

		<i>PNS yang mengikuti Bimtek/ Sosialisasi Peningkatan kapasitas Aparatur (orang)</i>	2							
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan keuangan OPD (dokumen)</i>	55	33	11	106	964%			
01.2.01	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	55	33	11	100	100%			
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	55	33	11	11	100%			
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (%)</i>	40	24	14	100	100%			
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (bulan)</i>	-	-	14	14	100%			
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (orang/bulan)</i>	40	24	12	12	100%			
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur(orang)</i>								

2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	<i>Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)</i>								
01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Tersedianya sarana prasarana aparatur</i>	66.008	4.926	100	100	100%			
2.15.01.2.06.01	Penyedia Komponen Instalasi Listrk / Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)</i>	68	42	30	30	100%			
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	<i>Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)</i>								
		<i>Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (unit)</i>								
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan(jenis)</i>	100	52	30	30	100%			
		<i>Jumlah ATK yang disediakan (jenis)</i>	160	96	40	40	100%			
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>tersedianya barang cetak dan pengadaan(lembar)</i>	64.100	3.840	37.500	35.000	93%			
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah makan dan minuman(porsi)</i>	1.500	900	147	147	100%			
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Penyelenggaraan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi SKPD (kali)</i>	80	48	61	60	98%			
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya sarana prasarana aparatur</i>	12	2	100	100	100%			

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	16	2	1	1	100%			
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran(%)</i>	613	389	100	100	100%			
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah jasa surat menyurat (kali)</i>	500	300	100	100	100%			
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)</i>	60	36	12	12	100%			
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang/bulan)</i>	3.180	636	53	53	100%			
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya sarana prasarana aparatur</i>	8	19	100	67	67%			
01.2.09.02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional (unit)</i>	7	18	6	6	100%			
		<i>Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara(unit)</i>			8	8	100%			
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	<i>Jumlah gedung kantor yang dipelihara(unit)</i>	1	1	2	2	100%			

[illegible]

2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah rambu rambu lalulintas yang diadakan (unit)	44							
		Jumlah lampu penerangan jalan umum yang diadakan (unit)	180		400	111	28%			
		Jumlah pagar pengaman jalan yang terpasang								
		Jumlah pembatas jalan yang diadakan								
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Tipe C									
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Pendukung Utama dan Penunjang)	Jumlah lampu penerangan jalan yang dipelihara(unit)	1.500	195						
		Jumlah terminal yang dipelihara/direhabilitasi(unit)	5	2						
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Umum Laik Jalan(%)	3.045		94.84					
2.15.02.2.03.04	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Frekwensi pengujian kendaraan angkutan umum (kali)	3.045							

2.15.02.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan (%)	25	5	100	100				
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam/ satu Daerah Kabupaten/ kota (laporan)</i>	25	5	5	5	100%			
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan angkutan orang dan trayek lintas daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan pelayanan angkutan (%)	240		100	100	100%			
2.15.02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik	<i>Jumlah ijin trayek pelayanan angkutan yang dikeluarkan (dokumen)</i>	240							
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah frekwensi koordinasi (kali)</i>	30		6	6	100%			

2.15.02.2.16.	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan</i>	51	36	12	12				
2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data Informatika Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam satu Daerah Kabupaten Kota	<i>jumlah dokumen data base bidang perhubungan (dokumen)</i>	2	1	1		0%			
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	<i>Prosentase Pengelolaan Penyeberangan</i>	53	36	100	14	14%			
2.15.03.2.06	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota		51	36	12	12	100%			
	pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal dalam daerah kabupaten kota yang terletak pada jaringan jalankabupaten kota dan atau jaringan jalur kereta api kabupaten dalam daerah kabupaten kota	<i>jumlah frekwensi pemeriksaan dan pengawasan armada angkutan laut (kali)</i>	51	36	12	12	100%			

2.15.03.2.12.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan pembangunan penerbitan ijin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal(laporan)	2	2	2	2	100%			
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Pelabuhan / terminal pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan yang dioperasi dan dipelihara (pelabuhan)	2	2	2	2	100%			

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Sampai Akhir Periode 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%) 2022		Realisasi capaian Program & Keg s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
A	Renstra 2023 - 2026									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100					100	100	1
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100					100	100	1

2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14					14	14	100%
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	36						12	33%
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12					12		0%
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	2					2		0%
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	8					2	2	25%
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	18						6	33%
2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	18						6	33%

2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	18						6	33%
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1					1		0%
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	30						12	40%
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	36						12	33%
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	4					2		0%
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-							
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	20					5	5	25%
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4					1	1	25%
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	8					2	2	25%

2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4					1	1	25%
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	8					2	2	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	1						1	100%
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	48					12	12	25%
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	48					12	12	25%
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	4					1	1	25%
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	36						12	33%
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	10							0%
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4					4		0%
2.15.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>	1						1	100%

2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	11					1		0%
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	11					1		0%
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	48					12	12	25%
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	48					12	1200%	25%
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	48					12	12	25%
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	14					14	14	100%
2.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	20					-	20	100%
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	30					10		0%

2.15.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>	1					1		0%
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3					2		0%
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	52						26	50%
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	8						4	50%
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik</i>	32%					52%	44%	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	5					1	2	40%
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	254					54	40	16%
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	<i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	2					1		0%

2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>	216					60		0%
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	<i>Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	10					6	3	30%
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	<i>Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	1					1		0%
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	4					1	1	25%
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	12					3	3	25%

2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	6					1	1	17%
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	8					2	2	25%
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar</i>	100					100	100	100%
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	6					2	2	33%
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>	2							
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	48					12	12	25%

2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	1							
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan</i>	1					1		0%
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	4					1	1	25%
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	56					14	14	25%

2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2						1	50%
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	166					42	42	25%
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	4					1	1	25%

2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2.15.02.2.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2					1	1	50%
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik</i>	15,5%					30.5%	25.5%	
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota									
2.15.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	34					34	34	100%

2.15.03.2.08.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	9					3		0%
2.15.03.2.08.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal</i>	9					3		0%
2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal									
2.15.03.2.10.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	6					2	2	33%

2.15.03.2.10.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	6					2	2	33%
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal									
2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara</i>	3					1		0%
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	22					22	22	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C		√	18%	23%	68%	82%	9%	0%	45%	27%	Dari 22 unit fasilitas terminal penumpang tipe C akan dibangun secara bertahap sesuai pembabakan renstra OPD
Rasio Ijin Trayek		√	2%	2%	2%	2%	0%	0%	100	100	Rasio ijin trayek angkutan umum sangat tergantung pada jumlah unit kendaraan wajib uji kir
Jumlah uji kir angkutan umum		√	59	82	100	100	79	52	100	150	Jumlah Kir kendaraan wajib uji masih terbatas di kecamatan-kecamatan di daratan Flotim mengikuti peralatan Uji yang digunakan sementara di Pulau Adonara dan Solor belum dijangkau, sehingga kedepannya harus diadakan unit Uji keliling
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten		√	5%	10%	26%	48%	3%	4%	30	50	Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas masih sebatas rekayasa musiman pada perayaan atau hajatan tertentu saja namun pada proyeksi mendatang akan dilakukan penataan jaringan trayek secara permanen dalam kota larantuka dengan memanfaatkan ruas jalan yang lainnya untuk membuka akses lalu lintas angkutan umum dan pendekatan pelayanan.

Dari tabel 2.2.di atas, dapat dilihat bahwa target dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan penyelenggaraan program urusan yakni Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan / LLAJ dan Program Pengelolaan Pelayaran. Untuk indikator peningkatan Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C per tahun dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan fasilitas utama dan pendukung yang mesti tersedia di lingkungan terminal mulai dari bangunan terminal penumpang, gerbang terminal, loket, jalan lingkungan, kantin dan kios, penerangan lingkungan terminal dan lain – lain sebagainya yang berjumlah 22 unit. Sedangkan untuk indikator Rasio Ijin Trayek dan Jumlah uji kir angkutan umum saling berhubungan di mana dokumen ijin trayek merupakan dokumen ikutan kendaraan setelah lulus uji kir. Uji kir dilakukan dengan dukungan peralatan meknikal sampai terbitnya buku uji elektronik. Mengikuti keberadaan peralatan uji di Larantuka maka kegiatan ini masih terbatas dilakukan di daratan larantuka dan sekitarnya, sementara di Pulau Adonara dan Solor kedepannya akan dipikirkan dilayani oleh unit uji mobile keliling. Demikian halnya terjadi juga dengan indicator Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten juga masih direncanakan pelaksanaannya sebatas kota Larantuka dan sekitarnya.

2.3. Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur.

Isu – isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur dirumuskan berdasarkan kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan transportasi dengan memperhatikan telaahan rentra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Isu strategis transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur yang disusun pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

a. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi laut

Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana baik utama maupun pendukung dalam lingkungan pelabuhan dapat menimbulkan tidak aman dan tidak nyamannya aktivitas masyarakat dalam lingkungan pelabuhan. Disamping itu pula ketersediaan alat angkut tentu diharapkan dapat membuka akses jaringan trayek untuk dapat menjangkau wilayah-wilayah terisolir sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan lewat ketersediaan sarana prasarana transportasi yang memadai. Fasilitas utama semisal adanya pelabuhan pengumpan lokal dalam skala kecil seperti jembatan tambatan perahu yang berfungsi menopang pelabuhan pengumpul lokal mesti memiliki terminal penumpang, lampu penerangan pelabuhan, kios dan kantin, kantor dan loket, ketersediaan air bersih, toilet umum dan lain-lain. Demikian pula ketersediaan alat angkut juga mesti menjamin kelaikan agar para penumpang dapat secara nyaman dan aman

berada dalam pelayaran. Maka itu, alat kelengkapan keselamatan juga menjadi faktor pendukung kelaiklautan kapal disamping fisik badan kapal dan permesinan serta administrasi / dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai aspek legalitas kapal dalam melakukan kegiatan operasional di laut.

b. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi darat.

Ketersediaan prasarana jalan di Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan upaya rekayasa lalu lintas dan penataan jaringan trayek angkutan umum. Disamping itu pula ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pun perlu disiapkan secara baik untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas pada setiap waktu seperti ketersediaan lampu penerangan jalan umum, pagar pengaman jalan, rambu-rambu lalu lintas, rambu pendahulu penunjuk jalan, marka jalan dan lain-lain. Segala fasilitas tersebut perlu dibangun untuk meminimalisir terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan juga fasilitas peralatan Uji Kendaraan Bermotor juga menjadi salah satu faktor penting terkait dengan penyediaan alat angkutan umum yang laik jalan, sehingga hal tersebut pun perlu diatur secara baik untuk melayani Uji kir kendaraan angkutan umum di Kabupaten Flores Timur.

Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan transportasi di daerah dilakukan oleh berbagai unsur pemerintah dan lembaga serta BUMN baik itu di sector transportasi darat maupun di sector transportasi laut berdasarkan ruang kewenangan masing-masing.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan. Penelaahan ini dilakukan bersama dengan Tim BP4D Kabupaten Flores Timur. Hasil review dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS PERHUBUNGAN				6.484.183.932					4.810.528.852	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	3.772.328.852	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	3.218.707.389	
		Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		
		Prosentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100				Prosentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		

		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100				Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		
Perencanaan,Pengang garan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah dokumen Perencanaan,Pengangga ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	75.000.000	Perencanaan,Peng anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	20.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Flores Timur	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	2	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Flores Timur	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	2	5.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)</i>	2	20.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)</i>	2	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	3	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	3	5.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)</i>	4	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)</i>	4	5.000.000	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.666.352.437	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.756.730.974	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Flores Timur	<i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>	14 bulan	2.586.352.437	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Flores Timur	<i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>	14 bulan	2.690.930.974	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</i>	12	45.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</i>	12	60.800.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah laporan keuangan Abulanan / triwulan / semseter SKPD dan laporan koordinasi penysunan laporan keungan bulanan / triwulan / semester SKPD (laporan)</i>	2	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah laporan keuangan Abulanan / triwulan / semseter SKPD dan laporan koordinasi penysunan laporan keungan bulanan / triwulan / semester SKPD (laporan)</i>	2	5.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Rencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	6	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Rencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	6	5.000.000	

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6	5.000.000	
Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	6	5.000.000	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	6	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	12	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	12	3.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Flores Timur	<i>Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>	12	5.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Flores Timur	<i>Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>	12	3.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				144.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				199.600.000	
Penyediaan Komponan Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Komponan Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	5	5.000.000	Penyediaan Komponan Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Komponan Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	5	5.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	1	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	1	5.000.000	

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)</i>	2	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)</i>	2	5.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)</i>	1	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)</i>	1	12.500.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan Yang disediakan (Paket)</i>	2	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Flores Timur	<i>Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan Yang disediakan (Paket)</i>	2	5.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan(Dokumen)</i>	1	5.000.000	-	-	-	-	-	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)</i>	12	15.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)</i>	12	7.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka, Kupang, Jakarta, Luar Wilayah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD (Laporan)</i>	12	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka, Kupang, Jakarta, Luar Wilayah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD (Laporan)</i>	12	150.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	1	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	1	5.000.000	

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</i>	12	4.600.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Flores Timur	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</i>	12	4.600.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.000.000	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Flores Timur	<i>Jumlah Unit Pengadaan Aset Tak Berwujud Yang Disediakan (Unit)</i>	1	5.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Flores Timur	<i>Jumlah Unit Pengadaan Aset Tak Berwujud Yang Disediakan (Unit)</i>	1	5.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				753.476.415	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				94.076.415	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Flores Timur	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	12	2.076.415	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Flores Timur	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	12	2.076.415	
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)</i>	12	20.000.000	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)</i>	12	20.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan (Laporan)</i>	12	731.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Flores Timur	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan (Laporan)</i>	12	72.000.000	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				97.900.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				122.300.000	
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Flores Timur	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	14	82.900.000	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Flores Timur	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	15	98.300.000	
Pemeliharaan Mebel	Flores Timur	<i>Jumlah Mebel Yang dipelihara (Unit)</i>	20	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Flores Timur	<i>Jumlah Mebel Yang dipelihara (Unit)</i>	20	2.000.000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Flores Timur	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)</i>	26	5.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Flores Timur	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)</i>	2	2.000.000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Flores Timur	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)</i>	4	5.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Flores Timur	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)</i>	2	20.000.000	
				2.257.855.080					1.406.821.463	

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota				700.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota				1.000.000.000	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Kec. Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri,A donara, Adonara Tengah,Ile Boleng,Ke lubagolit dan Witihama	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota Yang Tersedia (Unit)</i>	40	400.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Kec. Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri,Ado nara, Adonara Tengah,Ile Boleng,Kelu bagolit dan Witihama	<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota Yang Tersedia (Unit)</i>	80	1.000.000.000	
Pembangunan Prasarana jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		<i>Jumlah Prasarana jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang terbangun (unit)</i>	2	300.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				30.000.000	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				300.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Larantuka (Terminal Weri)	<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang di rehabilitasi dan di pelihara (unit)</i>	1	30.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Larantuka (Terminal Weri)	<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang di rehabilitasi dan di pelihara (unit)</i>	3	300.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				50.000.000	

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				370.088.744	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan kabupaten / Kota	Kec. Larantuka, Wulanggitan g,Adonara Barat, Tanjung Bunga	<i>Jumlah Laporan Kordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbagunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten Kota (Laporan)</i>	1	50.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Peleyanan Perizinan Berusaha Terintegerasi Secara Elektronik		<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Peleyanan Perizinan Berusaha Terintegerasi Secara Elektronik (Dokumen)</i>	1	320.088.744	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				106.821.463	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan kabupaten / Kota	Kec. Larantuka, Wulanggitan, Adonara Barat, Tanjung Bunga	<i>Jumlah Laporan Kordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbagunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten Kota (Laporan)</i>	1	50.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Larantuka (Kel.Weri)	<i>Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)</i>	9	15.000.000	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				325.766.336	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Denpasar Bali, Luar Wilayah	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Tingkatkan Kapasitasnya (Orang)</i>	2	51.821.463	

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Larantuka (Kel.Weri)	<i>Jumlah sarana dan Prasaranaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)</i>	1	200.000.000	Regitrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	19 Kec. Kabupaten Flores timur	<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)</i>	100	25.000.000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Denpasar Bali, Luar Wilayah	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Tingkatkan Kapasitasnya (Orang)</i>	2	60.766.336	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)</i>	1	15.000.000	
Regitrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	19 Kec. Kabupate n Flores timur	<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)</i>	100	35.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				25.000.000	
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)</i>	2	30.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota (Laporan)</i>	12	25.000.000	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				150.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau BarangAntar Kota Dalam 1 (satua0 DaerahKabupaten/ Kota				25.000.000	

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota (Laporan)</i>	12	150.000.000	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/ Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam/ satu Daerah Kabupaten/ kota (laporan)</i>	12	25.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satua0 DaerahKabupaten/Kota				240.000.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satua) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satua0 DaerahKabupaten/Kota		<i>Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satua) DaerahKabupaten/Kota (unit)</i>	1	160.000.000	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satua) Daerah Kabupaten/	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satua) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	1	100.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/ Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam/ satu Daerah Kabupaten/ kota (laporan)</i>	14	80.000.000	Perbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				45.000.000	

Penetapan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satunya) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Larantuka	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	25.000.000	
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satunya) Daerah Kabupaten/	Larantuka	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satunya) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1	30.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Larantuka	Jumlah Laporan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Terayek Kewenangan Kabupaten Kota dalam sistem pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan)	12	20.000.000	
Perbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				117.000.000	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000	

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Peleyanan Perizinan Berusaha Terintegerasi Secara Elektronik	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten Kota dalam sistem pelayanan Perizinan berusaha Terintegerasi Secara Elektronik (Laporan)</i>	42	42.000.000	Penyediaan Data dan InformasiTarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dearah kabupaten/Kota	Larantuka	<i>jumlah Data dan InformasiTarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dearah kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1	25.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan peleksanaan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	1	75.000.000	-	-	-	-	-	
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000	-	-	-	-	-	
Penyediaan Data dan InformasiTarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1	Larantuka	<i>jumlah Data dan InformasiTarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dearah</i>	1	25.000.000						

(satu) Dearah kabupaten/Kota		<i>kabupaten/Kota (Dokumen)</i>								
				454.000.000					185.000.000	
Penerbitan Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah kabupaten /Kota				84.000.000	Penerbitan Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah kabupaten /Kota				40.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)</i>	34	34.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)</i>	12	20.000.000	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut k Kewenangan Kabupaten/ Kota	Larantuka, Kupang, Jakarta	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	68	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut k Kewenangan Kabupaten/ Kota	Larantuka, Kupang, Jakarta	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	12	20.000.000	
Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				70.000.000	Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				55.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	<i>Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)</i>	2	20.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	<i>Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	2	20.000.000	

Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota(laporan)</i>	22	50.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	4	35.000.000	
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				100.000.000	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan(DLK P) Pelabuhan Pengumpan Lokal				55.000.000	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	2	50.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	2	20.000.000	

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	2	50.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Larantuka	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	2	20.000.000	
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				200.000.000	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				50.000.000	
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal	Adonara(Pelabuhan Deri) Solor (Pelabuhan Lohayong)	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal (Laporan)</i>	22	200.000.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal	Adonara(Pelabuhan Deri) Solor (Pelabuhan Lohayong)	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal (Laporan)</i>	12	50.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan usulan masyarakat diperoleh dari proses pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan, hasil reses Anggota DPRD, kunjungan kerja Kepala Daerah dan proposal dari masyarakat. Usulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	BESARAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Perhubungan					
I	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Prosentase Peningkatan Prasarana Transportasi Darat dalam kondisi baik		1.000.000.000	
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten kota		1.000.000.000	
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Kec. Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri,Adonara, Adonara Tengah,Ile Boleng,Kelubagolit dan Witihama	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten kota yang tersedia (unit)	80	1.000.000.000	Usulan musrenbang Lampu Penerangan Jalan Umum diterima

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan 4 (empat) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Perekonomian Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Tata Kelola Pemerintahan.

Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2024 yaitu ***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***. Sesuai dengan tema RKP 2024 tersebut, maka pembangunan Nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi :

- (1) *Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;*
- (2) *Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;*
- (3) *Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;*
- (4) *Penguatan Daya Saing Usaha ;*
- (5) *Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;*
- (6) *Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;*
- (7) *Pembangunan Ibu Kota Nusantara;*
- (8) *Pelaksanaan Pemilu 2024.*

Kebijakan Nasional tersebut harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan terintegrasi. Untuk mewujudkan Transformasi Ekonomi, perlu dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan melalui 3 (tiga) pilar yaitu (1) Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) Perluasan dan kesempatan kerja. Selain 3 (tiga) pilar tersebut, Pemerintah menetapkan beberapa fokus RKP 2024 yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembangunan Flores Timur, yakni:

- 1) *Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*, melalui penguatan sistem Jaminan Sosial, modernisasi Pertanian dan pemerataan pembangunan;
- 2) *Peningkatan Kualitas SDM (Kesehatan dan Pendidikan)*, melalui peningkatan sistem Kesehatan dan Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter);
- 3) *Penanggulangan Pengangguran disertai Peningkatan Decent Job*, melalui penyediaan lapangan usaha;
- 4) *Mendorong Pemulihan Dunia Usaha*, melalui Revitalisasi Pariwisata dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

- 5) *Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan*, melalui pengembangan industrialisasi, riset dan inovasi;
- 6) *Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim*, melalui penerapan ekonomi rendah karbon dan transisi energi;
- 7) *Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar (Air Bersih dan Sanitasi)*, melalui penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan infrastruktur digital dan peningkatan infrastruktur konektivitas.
- 8) *Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu 2024*.

Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijumpatani oleh sinergitas pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur sebagai OPD teknis pelaksana urusan pemerintahan Bidang Perhubungan. Dalam penyusunan Renja diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2021)	Target kinerja (2024)
	Terwujudnya daya saing infrastruktur	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	65.0	74.5
		Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	40	56

Dari tujuan dan sasaran di atas, maka ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan urusan yang menjadi target Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR IKK	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN TAHUN 2024
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	%	41	82
2.	<i>Rasio Ijin Trayek</i>	%	0.02	0.02
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	jumlah	79	100
4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	%	6.67	48.13

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan pertimbangan faktor-faktor berikut :

- 1. Pencapaian misi daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Flores Timur.
- 2. Intervensi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pengembangan transportasi untuk menjangkau semua daerah terisolir.
- 3. Kesenambungan program dan kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya.
- 4. Pendayagunaan potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 terdiri dari 2 program prioritas dan 1 program penunjang, 21 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Semua program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Flores Timur terutama pekerjaan pemabngunan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi seperti perlengkapan jalan (lemapu penerangan jalan umum,. Pagu indikatif Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebesar Rp. 4.825.528.852, untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 3.218.707.389, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp. 1.406.821.463, Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp. 200.000.000,- Rencana Program dan Kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU 2025	
							Lokasi	Target Capian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber dana		Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				1.606.821.463				3.092.270.568
2.15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1.406.821.463				2.672.270.568
2.15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota				1.000.000.000				895.000.000
2.15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota Yang Tersedia (Unit)	Kec. Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri,Adonara, Adonara Tengah,Ile Boleng,Kelubagolit dan Witihamas	80	1.000.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	85	895.000.000
2.15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				30.000.000				300.000.000
2.15	02	2	03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang di rehabilitasi dan di pelihara (unit)	Larantuka (Terminal Weri)	1	30.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	-
2.15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				50.000.000				50.000.000

2.15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan kabupaten / Kota	<i>Jumlah Laporan Kordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbagunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten Kota (Laporan)</i>	Kec. Larantuka, Wulanggitang, Adonara Barat, Tanjung Bunga	1	50.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3	50.000.000
2.15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				106.821.463				975.270.568
2.15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah sarana dan Prasaranan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)</i>	Larantuka (Kel.Weri)	9	15.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3	850.000.000
2.15	02	2	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Tingkatkan Kapasitasnya (Orang)</i>	Denpasar Bali, Luar Wilayah	2	51.821.463	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	60.000.000
2.15	02	2	05	03	Regitrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)</i>	19 Kec. Kabupaten Flores timur	100	25.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	100	35.000.000
2.15	02	2	05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)</i>	Larantuka	1	15.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	30.270.568
2.15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				25.000.000				200.000.000
2.15	02	2	06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota (Laporan)</i>	Larantuka	12	25.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	12	200.000.000

2.15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000				80.000.000
2.15	02	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam/ satu Daerah Kabupaten/ kota (laporan)</i>	Larantuka	12	25.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	14	80.000.000
2.15	02	2	12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000				30.000.000
2.15	02	2	09	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	Larantuka	1	100.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	30.000.000
2.15	02	2	14		Perbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				45.000.000				142.000.000
2.15	02	2	14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	Larantuka	1	25.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	100.000.000
2.15	02	2	14	03	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Jumlah Laporan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten Kota dalam sistem pelayanan Perizinan berusaha</i>	Larantuka	12	20.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	42	42.000.000

						<i>Terintegrasi Secara Elektronik (Laporan)</i>							
2.15	02	2	16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000				-
2.15	02	2	16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dearah kabupaten/Kota	<i>jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dearah kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	Larantuka	1	25.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	-
2.15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				185.000.000				420.000.000
2.15	03	2	01		Penerbitan Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah kabupaten /Kota				40.000.000				50.000.000
2.15	03	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)</i>	Larantuka	12	20.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	-

2.15	03	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut k Kewenangan Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	Larantuka, Kupang,Jakarta	12	20.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	68	50.000.000
2.15	03	2	07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				55.000.000				70.000.000
2.15	03	2	07	03	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	Larantuka	2	20.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	20.000.000
2.15	03	2	07	04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	Larantuka	4	35.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	22	50.000.000
2.15	03	2	10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				55.000.000				100.000.000
2.15	03	2	10	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	Larantuka	2	20.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	50.000.000

2.15	03	2	10	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	Larantuka	2	20.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	50.000.000
2.15	03	2	12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				50.000.000				200.000.000
2.15	03	2	12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal (Laporan)</i>	Adonara(Pelabuhan Deri) Solor (Pelabuhan Lohayong)	12	50.000.000	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	22	200.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan pada Daerah dan berdasarkan kajian terhadap berbagai hal tersebut maka dirumuskan tema RKPD Kabupaten Flores Timur : ***“Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas”***. Maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan PD
Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PERKIRAAN MAJU 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	4	6	10	11
2.15					DINAS PERHUBUNGAN			4.810.528.852					6.866.977.598
2.15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			3.218.707.389					3.774.707.030
2.15	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.000.000					66.227.544
2.15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	2	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	2	15.000.000
2.15	01	2	01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)</i>	2	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	2	15.000.000
2.15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	3	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	3	20.000.000

2.15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)</i>	4	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	4	16.227.544
2.15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.756.730.974					2.718.079.486
2.15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)</i>	14 bulan	2.690.930.974	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	14 bulan	2.638.079.486
2.15	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</i>	12	60.800.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU		12	45.000.000
2.15	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD	<i>Jumlah laporan keuangan Abulanan / triwulan / semseter SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keungan bulanan / triwulan / semester SKPD (laporan)</i>	2	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	2	35.000.000
2.15	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000					20.000.000
2.15	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)</i>	6	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	6	5.000.000
2.15	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	6	10.000.000
2.15	01	2	03	06	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	6	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	6	5.000.000
2.15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.000.000					10.000.000
2.15	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	12	3.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	12	5.000.000
2.15	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)</i>	12	3.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	12	

2.15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			199.600.000					134.600.000
2.15	01	2	06	01	Penyediaan Komponan Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponan Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	5	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	5	5.000.000
2.15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)</i>	1	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	1	5.000.000
2.15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)</i>	2	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	2	5.000.000
2.15	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)</i>	1	12.500.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	1	10.000.000
2.15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan Yang disediakan (Paket)</i>	2	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	2	15.000.000
2.15	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)</i>	12	7.500.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	12	15.000.000
2.15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD (Laporan)</i>	12	150.000.000	Larantuka,Kupang,Jakarta, Luar Wilayah	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	12	70.000.000
2.15	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)</i>	1	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	1	5.000.000
2.15	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)</i>	12	4.600.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	12	4.600.000
2.15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.000.000					-

2.15	01	2	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	<i>Jumlah Unit Pengadaan Aset Tak Berwujud Yang Disediakan (Unit)</i>	1	5.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	-	-
2.15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			94.076.415					752.900.000
2.15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>	12	2.076.415	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	12	1.500.000
2.15	01	2	08	02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)</i>	12	20.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	12	20.000.000
2.15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan (Laporan)</i>	12	72.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	12	731.400.000
2.15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			122.300.000					72.900.000
2.15	01	2	09	02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)</i>	15	98.300.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	14	72.900.000
2.15	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	<i>Jumlah Mebel Yang dipelihara (Unit)</i>	20	2.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	-	-
2.15	01	2	09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)</i>	2	2.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	-	-
2.15	01	2	09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)</i>	2	20.000.000	Flores Timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Penunjang prioritas	-	-
2.15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			1.591.821.463					3.092.270.568

2.15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			1.406.821.463					2.672.270.568
2.15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota			1.000.000.000					895.000.000
2.15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota Yang Tersedia (Unit)	80	1.000.000.000	Kec. Larantuka, Adonara Timur, Ile Mandiri, Adonara, Adonara Tengah, Ile Boleng, Kelu bagolit dan Witihama	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	85	895.000.000
2.15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			30.000.000					300.000.000
2.15	02	2	03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang di rehabilitasi dan di pelihara (unit)	1	30.000.000	Larantuka (Terminal Weri)	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	-
2.15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			50.000.000					50.000.000
2.15	02	2	04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Kordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Terbagunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten Kota (Laporan)	1	50.000.000	Kec. Larantuka, Wulanggitan g, Adonara Barat, Tanjung Bunga	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3	50.000.000
2.15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			106.821.463					975.270.568

2.15	02	2	05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)</i>	9	15.000.000	Larantuka (Kel.Weri)	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3	850.000.000
2.15	02	2	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Tingkatkan Kapasitasnya (Orang)</i>	2	51.821.463	Denpasar Bali, Luar Wilayah	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	60.000.000
2.15	02	2	05	03	Regitrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)</i>	100	25.000.000	19 Kec. Kabupaten Flores timur	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	100	35.000.000
2.15	02	2	05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)</i>	1	15.000.000	Larantuka	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	30.270.568
2.15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			25.000.000					200.000.000
2.15	02	2	06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota (Laporan)</i>	12	25.000.000	Larantuka	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	12	200.000.000
2.15	02	2	09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satua0 Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000					80.000.000
2.15	02	2	09	02	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam/ satu Daerah Kabupaten/ kota (laporan)</i>	12	25.000.000	Larantuka	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	14	80.000.000
2.15	02	2	12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satua) Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000					30.000.000

2.15	02	2	09	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satua) Daerah Kabupaten/	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satua) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)</i>	1	100.000.000	Larantuka	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	30.000.000
2.15	02	2	14		Perbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			45.000.000					142.000.000
2.15	02	2	14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan peleksanaan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	1	25.000.000	Larantuka	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1	100.000.000
2.15	02	2	14	03	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Peleyanan Perizinan Berusaha Terintegerasi Secara Elektronik	<i>Jumlah Laporan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten Kota dalam sistem pelayanan Perizinan berusaha Terintegerasi Secara Elektronik (Laporan)</i>	12	20.000.000	Larantuka	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	42	42.000.000
2.15	02	2	16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000					-
2.15	02	2	16	02	Penyediaan Data dan InformasiTarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dearah kabupaten/Kota	<i>jumlah Data dan InformasiTarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dearah kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	1	25.000.000	Larantuka	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	-
2.15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			185.000.000					420.000.000
2.15	03	2	01		Penerbitan Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah kabupaten/Kota dan			40.000.000					50.000.000

					Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah kabupaten /Kota								
2.15	03	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)</i>	12	20.000.000	Larantuka	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	-	-
2.15	03	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut k Kewenangan Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)</i>	12	20.000.000	Larantuka, Kupang, Jakarta	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	68	50.000.000
2.15	03	2	07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			55.000.000					70.000.000
2.15	03	2	07	03	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)</i>	2	20.000.000	Larantuka	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	2	20.000.000
2.15	03	2	07	04	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	4	35.000.000	Larantuka	Dana Tranfer Umum - DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	22	50.000.000

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada RPJMN, RPJP Provinsi, RKPD Provinsi, RPJMPD Kabupaten, Rencana Pembangunan Daerah / RPD Kabupaten 2023-2026, RKPD Kabupaten Flores Timur, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2024.

Dokumen Rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman dan gambaran arah pembangunan penyelenggaraan transportasi yang memuat program dan kegiatan serta pagu anggaran yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 secara detail, memuat program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan yang mengacu pada agenda penyelenggaraan transportasi yang termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur 2023-2026. Prioritas utama Renja ini diarahkan pada peningkatan kinerja pelayanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang handal di bidang perhubungan.

Akhirnya, dengan memohon Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga dalam pelaksanaannya Renja Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi kita semua demi mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Larantuka, 01 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN FLORES TIMUR,**

LAURENSIUS YITNO WADA, SE.M.Si

Pembina. Tk.I

NIP. 19730603 200003 1 005

